

LAPORAN TAHUNAN



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI

TAHUN 2023



0741-444015



Dlhkota2017@gmail.com



Dlh.jambikota.go.id

**Jl. JenderalBasukiRahmad
No. 8 Kota Baru Kota Jambi**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhana Wataala, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2023.

Laporan ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Laporan Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan yang tetuang dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2018-2023.

Kami menyadari bahwa dalam penyajian laporan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan ini. Semoga laporan tahunan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jambi, Januari 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Jambi



Dr. H. ARDI, SP, M.Si

NIP.197006121998031004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	I-7
1.3 Tantangan dan Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	I-8
BAB II PAGU BELANJA DAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1 Pagu Belanja Perangkat Daerah berdasarkan Komponen Belanja Beserta Realisasi	II-1
2.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah	II-3
2.3 Capaian Kinerja Sasaran RPJMD, Tujuan dan Sasaran OPD serta Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	II-6
2.4 Akuntabilitas Kinerja.....	II-26
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.	III-1
BAB IV INOVASI, PRESTASI DAN PENGHARGAAN	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Aset Perangkat Daerah	I-5
1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021- 2023	I-7
1.3 Tantangan, Permasalahan dan Upaya Mengatasi Tantangan dan Permasalahan Tahun 2023	I-8
2.1 Penjabaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun Anggaran 2023	II-1
2.2 Keterkaitan Urusan Lingkungan Hidup dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023	I-6
2.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2023	II-9
2.4 Capaian Program Perangkat Daerah Kota Jambi Tahun 2023	II-11
2.5 Tindak lanjut rekomendasi DPRD atas LKPJ Walikota Jambi Tahun 2022	II-26
2.6 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023	II-27
2.7 Indikator Kinerja Kunci	II-27
2.8 Capaian SDGs	II-30
4.1 Daftar Inovasi Organisasi Perangkat Daerah Kota Jambi Tahun 2023	IV-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Dengan landasan pemikiran tersebut, laporan diakhir masa RPJMDP periode tahun 2018 - 2023 ini disusun, menyajikan capaian kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi berdasarkan dengan Rencana Strategis Perubahan tahun 2018-2023 dan Rencana Kinerja tahun 2023 yang telah dibuat sebelumnya. Dengan disusunnya Laporan Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2023 ini diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi;
2. Mendorong Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai kewenangan membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

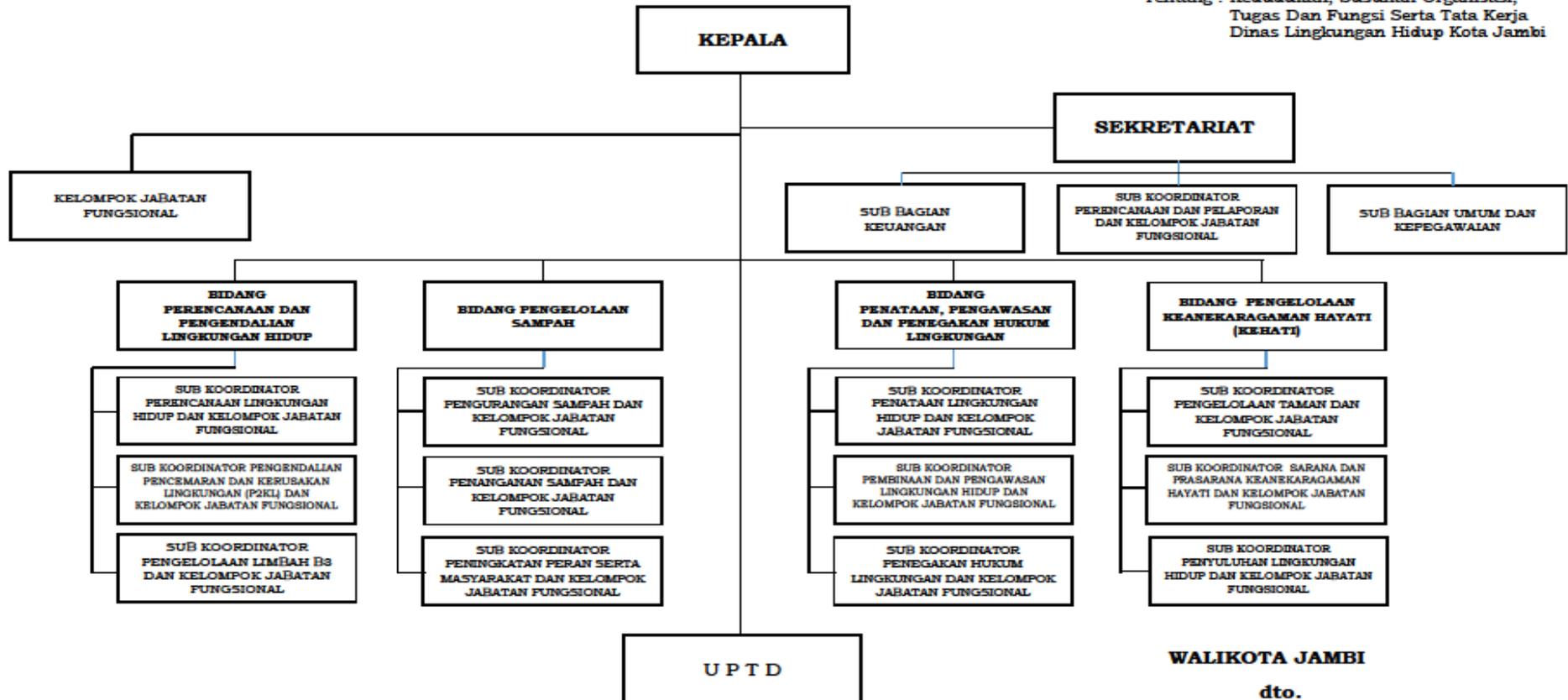
Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
3. Penataan lingkungan hidup yang meliputi : perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan perencanaan kajian lingkungan hidup strategis, kajian dampak lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
4. Pengelolaan sampah yang meliputi : pengurangan sampah dan penanganan sampah, pengangkutan dan sarana prasarana persampahan.
5. Pengelolaan limbah berbahaya dan beracun.
6. Pengelolaan taman, hutan kota, pohon pelindung dan jalur hijau
7. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemeliharaan lingkungan hidup serta pemantauan lingkungan hidup.
8. Penataan lingkungan hidup yang meliputi : penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup serta penegakan hukum.
9. Pengawasan di bidang lingkungan hidup.
10. Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup.
11. Pelaksana dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang lingkungan hidup.
12. Pelaksana program strategis bidang lingkungan hidup antara lain : Adipura, Adiwiyata, DIKLHD, Proklamasi, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Langit Biru, Duta Lingkungan.
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Dr. H. ARDI, SP, M.Si yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini :

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA JAMBI
 Nomor : 53 Tahun 2021
 Tanggal : 31 Desember 2021
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja
 Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi



WALIKOTA JAMBI
 dto.
SYARIF FASHA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Lingkungan Kota Jambi memiliki sumber daya manusia Pada Tahun 2023 terdapat 154 pegawai yang terdiri dari 69 orang PNS dan 85 orang Tenaga Kontrak. Sedangkan bila dilihat berdasarkan jenis kelaminnya sebagian besar merupakan pegawai laki-laki yaitu sebanyak 59,74% (92 orang) dan sisanya sebanyak 40,26% merupakan pegawai perempuan (62 orang). Pegawai golongan IV sebanyak 11 (sebelas) orang, golongan III sebanyak 35 orang, golongan II sebanyak 22 orang serta golongan I sebanyak 2 orang.

Pada tahun 2023 Indeks Profesionalitas ASN Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mendapatkan nilai

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi memiliki sarana dan prasarana pendukung sebagaimana terinci pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Aset Perangkat Daerah

No	Uraian	Saldo Akhir s/d Tahun 2023	
		Jumlah Barang	Harga Barang
	TANAH	8	943.500.000,00
1	TANAH	8	943.500.000,00
	PERALATAN DAN MESIN	1.580	33.814.225.396,15
1	ALAT BESAR	28	5.272.056.939,00
2	ALAT ANGKUTAN	193	13.966.026.158,34
3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	102	456.881.100,00
4	ALAT PERTANIAN	74	1.065.752.200,00
5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	599	4.695.462.447,51
6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	126	756.488.040,00
7	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	1	2.497.500,00
8	ALAT LABORATORIUM	301	6.238.433.248,30
9	ALAT PERSENJATAAN	-	-
10	KOMPUTER	155	1.354.744.763,00
11	ALAT EKSPLORASI	-	-
12	ALAT PENGEBORAN	-	-
13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	-	-

14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-
15	ALAT KESELAMATAN KERJA	1	5.883.000,00
16	ALAT PERAGA	-	-
17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-
18	RAMBU - RAMBU	-	-
19	PERALATAN OLAH RAGA	-	-
	GEDUNG DAN BANGUNAN	284	40.871.855.268,63
01	BANGUNAN GEDUNG	281	40.611.149.668,63
02	MONUMEN	-	-
03	BANGUNAN MENARA	-	-
04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	3	260.705.600,00
	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	30	3.432.188.485,46
01	JALAN DAN JEMBATAN	6	603.574.000,00
02	BANGUNAN AIR	6	1.671.801.230,46
03	INSTALASI	6	756.323.000,00
04	JARINGAN	12	400.490.255,00
	ASET TETAP LAINNYA	70	3.001.553.952,06
01	BAHAN PERPUSTAKAAN	-	-
02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	-	-
03	HEWAN	18	31.750.002,06
04	BIOTA PERAIRAN	-	-
05	TANAMAN	52	2.969.803.950,00
06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-
07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-
	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-
01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-
	ASET LAINNYA	174	3.294.109.040
01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	-	-
02	ASET TIDAK BERWUJUD	2	159.335.000,00
03	ASET LAIN-LAIN	172	3.134.774.040,00
	JUMLAH TOTAL	2.146	85.357.432.142,30

1.2 Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

a. Target dan Realisasi Tahun 2021-2023

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun 2021-2023

No	Jenis PAD	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	11.500.000.000	11.508.497.566	13.000.000.000	10.690.877.744	14.000.000.000	9.583.936.146
2	Retribusi masuk Hutan Kota	150.000.000	208.230.000	200.000.000	378.150.000	300.000.000	383.835.000
3	Retribusi Pengujian Sampel		46.541.100		181.119.900	150.000.000	295.794.600
4	Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	391.637.953	411.102.700	391.637.953	396.850.600	391.637.953	246.248500

b. Tantangan dan Permasalahan serta Upaya yang dilakukan untuk Mengatasi Tantangan dan Permasalahan serta Tingkat Keberhasilan yang dicapai.

Tabel 1.3
Tantangan, Permasalahan dan Upaya Mengatasi Tantangan dan Permasalahan Tahun 2023

No	Jenis PAD	Tantangan	Permasalahan	Upaya mengatasi Tantangan dan Permasalahan
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya peta jalan untuk peningkatan pelayanan pengelolaan sampah hingga ke tingkat objek retribusi (sumber) - Minimnya pemahaman objek retribusi dalam menjalankan kewajiban membayar retribusi - Belum adanya mekanisme (SOP) baku dalam pemungutan retribusi 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya perencanaan & peningkatan sarana prasarana + tolls pengelolaan sampah (TPS, Armada, Fasilitas pengolahan, edukasi, aplikasi) - Belum ada peta jalan data pemenuhan target retribusi 	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat peta jalan target retribusi dalam Renstra DLH - Membuat SOP pemungutan retribusi (SOP manual & aplikasi) - Membuat aplikasi pembayaran retribusi - Validasi objek retribusi (pelaku usaha + masyarakat)

No	Jenis PAD	Tantangan	Permasalahan	Upaya mengatasi Tantangan dan Permasalahan
			persampahan - Base data objek retribusi yang tidak tervalidasi keaktifannya	
2	Retribusi masuk Hutan Kota	Penagihan Retribusi Masuk Hutan Kota	Masih ada sebagian masyarakat/pengunjung/pengguna Hutan Kota yang tidak mau membayar ataupun minta keringanan dalam pembayaran retribusi masuk hutan kota	Memberikan penjelasan kepada masyarakat/ pengunjung/ pengguna Hutan Kota bahwa Retribusi ini merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah Kota Jambi dan nantinya akan digunakan kembali untuk biaya kegiatan pembangunan Daerah Kota Jambi
3	Retribusi Pengujian Sampel	<ul style="list-style-type: none"> - Persaingan pangsa pasar antara Laboratorium Swasta dengan Laboratorium Pemerintah - Meyakinkan customer terhadap kualitas pelayanan - Meningkatkan kualitas pelayanan pengujian terhadap uji Laboratorium kualitas Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya peralatan dan bahan kimia untuk pengujian (menambah ruang lingkup pengujian - Kurangnya pengetahuan customer terhadap pentingnya pengujian sampel - Bahan kimia yang terhambat dikarenakan kendala pengiriman 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan SDM Laboratorium dengan pelatihan-pelatihan - Sosialisasi kepada customer/pihak Perusahaan tentang pengujian sampel dan keuntungan melakukan pengujian - Menambah peralatan dan bahan kimia agar terpenuhinya permintaan customer - Memaksimalkan waktu pelayanan di Laboratorium
4	Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	- Belum adanya reward yang ditetapkan dalam ketaatan pengelolaan sampah dan atas pembayaran retribusi sampah	- Base data objek retribusi yang tidak tervalidasi keaktifannya	- Validasi objek retribusi (pelaku usaha + masyarakat)

1.3 Tantangan dan Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah.

Tantangan dan permasalahan penyelenggaraan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi antara lain yaitu :

1. Meningkatnya beban pencemaran yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup.
2. Keterbatasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) akibat alih fungsi lahan.
3. Pengelolaan sampah yang belum sepenuhnya dapat menerapkan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
5. Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
7. Masih kurang memadainya sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
8. Masih terbatasnya anggaran dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
9. Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah dalam pemantauan dan pengelolaan lingkungan.

BAB II
PAGU BELANJA DAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
2.1 Pagu Belanja Perangkat Daerah berdasarkan Komponen Belanja Beserta Realisasi

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mendapat dana sebesar Rp. 52.459.112.057,-. Adapun realisasi anggaran belanja daerah terealisasi sebesar Rp. 50.995.319.563,- sehingga anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 1.463.792.494,- atau dana yang terserap sebesar Rp. 97.21%.

Tabel 2.1
Penjabaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Realisasi
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
5	Belanja Daerah					
5.1	Belanja Operasi	50.082.498.189	52.086.956.311	2.004.458.122	4,00	50.649.054.208
5.1.01	Belanja Pegawai	9.056.295.181	8.565.826.290	- 490.468.891	-5,42	8.037.634.306
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.026.203.008	43.521.130.021	2.494.927.013	6,08	42.611.419.902
5.2	Belanja Modal	300.501.811	372.155.746	71.653.935	23,84	346.265.355
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.501.811	372.155.746	71.653.935	23,84	346.265.355
	Jumlah Belanja	50.383.000.000	52.459.112.057	2.076.112.057	4,12	50.995.319.563
	Total Surplus/(Defisit)	-35.541.362.047	-37.617.474.104	-2.076.112.057	5,84	

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan pada Tahun 2023 sebesar Rp. 14.841.637.953,- (Empat belas milyar delapan ratus empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 10.509.814.246,- (Sepuluh milyar lima ratus sembilan juta delapan ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah) atau dapat direalisasikan 70,81% dari target yang telah ditetapkan. Tidak tercapainya target PAD tersebut dikarenakan :

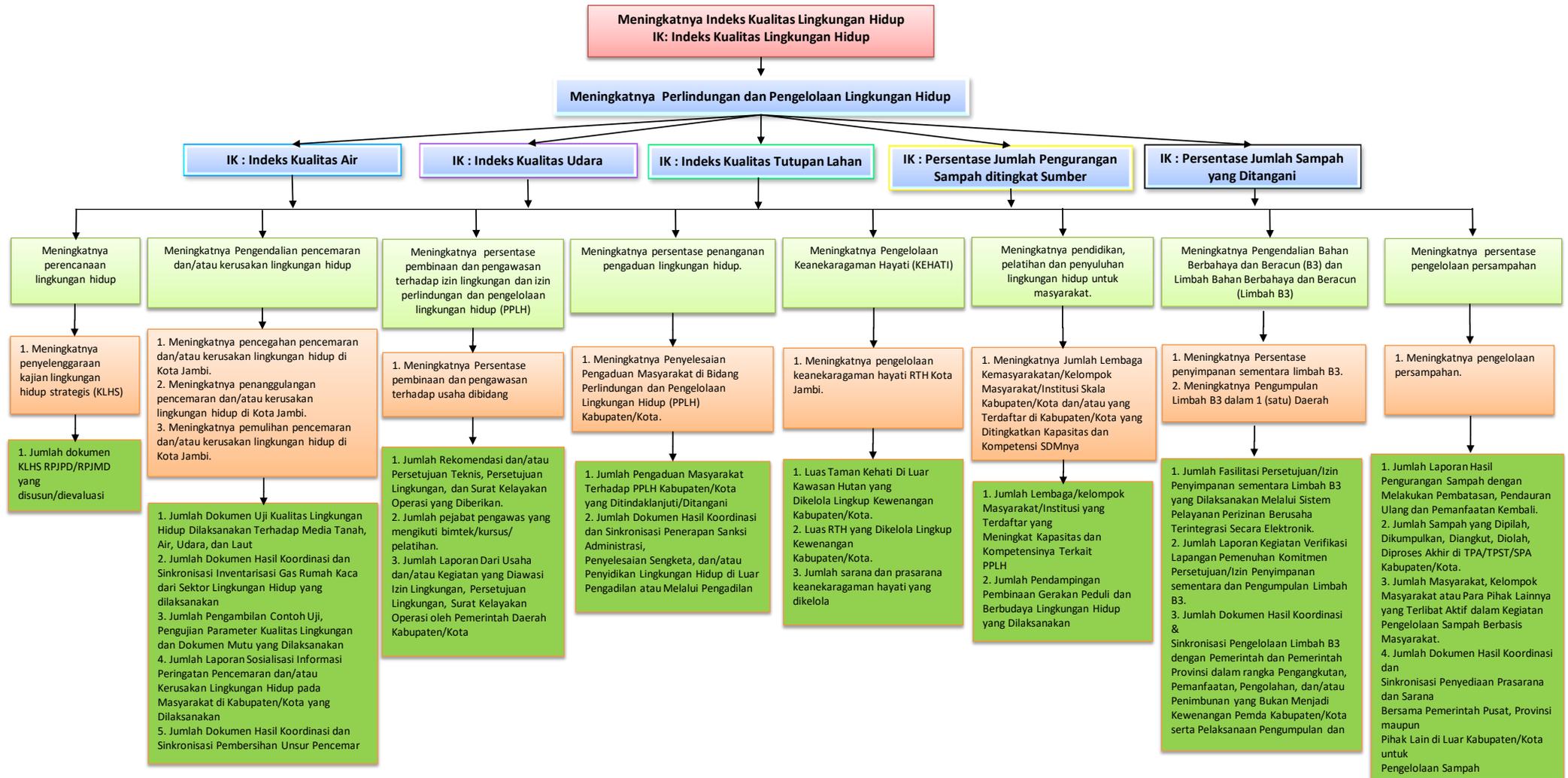
1. Banyaknya wajib retribusi persampahan yang sudah tutup usaha.
2. Wajib retribusi yang masih menunggak membayar dikarenakan adanya penurunan pemasukan yang diterima pelaku usaha.
3. Ketidaktahuan terhadap adanya retribusi yang harus dibayarkan setiap tahun sehingga wajib retribusi tidak meregistrasi perizinan atau Izin Usaha berupa SITU, karena wajib retribusi menganggap bahwa SITU sudah dihapuskan.

2.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

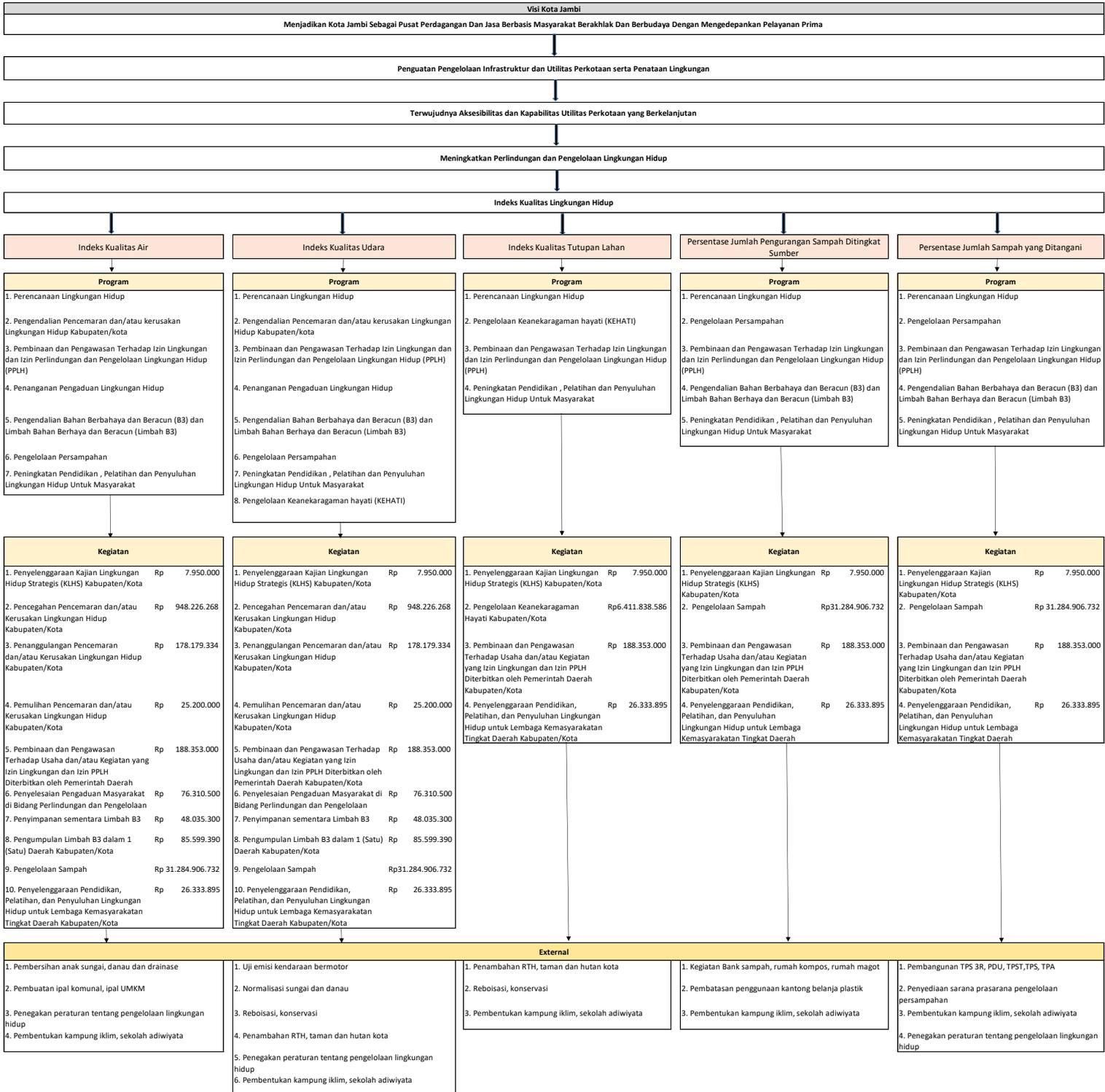
CASCADING KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI

Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup													Sasaran Pembangunan																	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup													RPI/MD																	
T : 59,30																														
Regulasi	Tata Kelola Lingkungan Hidup				Tata Kelola Pelayanan Perizinan Lingkungan Hidup dan Pengawasan				Tata Kelola		Pengelolaan Sampah			Key Success Factor																
Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup													Sasaran PD																	
Indeks Kualitas Air				Indeks Kualitas Udara				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Persentase Jumlah Pengurangan Sampah Ditingkat Sumber	Persentase Jumlah Sampah yang Ditangani			Renstra																	
T : 43,00				T : 88,10				T : 49,93	T : 22,75%	T : 74,75%																				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Keekaragaman Hayati (KEHATI)	Program Peningkatan Pendidikan , Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		Program Pengelolaan Sampah	Program																
Indeks Reformasi Birokrasi	Kesesuaian Perencanaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten Kota			Status Mutu Air dan Danau Kota Jambi		Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup	Meningkatnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Persentase Orang Atau Lembaga Yang Mendapatkan Fasilitas pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan		Persentase Pengelolaan persampahan																	
T : 88	T : 100%			T : 7 Nilai		T : 100%		T : 100%	T : 100%	T : 42 Nilai	T : 100%		T : 92																	
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.			1. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		1. Penyimpanan Sementara Limbah B3		1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		1. Pengelolaan Keekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1. Pengelolaan Sampah												
Peningkatan nilai AKIP	70 Nilai	Rp 77.024.999	Keselarasan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis dengan dokumen perencanaan			100%	Rp 7.950.000	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi	100%	Rp 948.226.268	Persentase penyimpanan sementara limbah B3	100%	Rp 48.035.300	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha di bidang lingkungan hidup	100%	Rp 188.353.000	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup	100%	Rp 76.310.500	Persentase peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati RTH Kota Jambi	37,04%	Rp 6.411.838.586	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitas pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	100%	Rp 26.333.895	Persentase berkurangnya sampah yang terangkut ke TPA	13,73%	Rp 31.284.906.732		
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.			2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			2. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																								
Tertib pengelolaan administrasi keuangan	100%	Rp 9.146.586.603				100%	Rp 178.179.334	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi	100%	Rp 178.179.334	Terkelolanya limbah B3 Medis Covid-19 yang bersumber dari fasilitas isolasi diluar fasilitas pelayanan kesehatan	100%	Rp 85.599.390																	
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.			3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota																											
Tertib pengelolaan administrasi barang milik daerah	100%	Rp 63.960.000				22,50%	Rp 25.200.000	Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup																						
4. Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah.																														
Index profesionalitas ASN perangkat daerah	100%	Rp 210.220.000																												
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah.																														
Tertib pengelolaan administrasi umum	100%	Rp 404.586.590																												
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.																														
Tertib pengelolaan administrasi umum	100%	Rp 43.636.368																												
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.																														
Tertib pengelolaan administrasi umum	100%	Rp 816.339.099																												
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.																														
Tertib pengelolaan administrasi umum	100%	Rp 339.713.341																												
Sekretariat	Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup				Bidang Penataan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan				Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)		Bidang Pengelolaan Sampah			Penanggung Jawab																

POHON KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI



CROSS CUTTING DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI
Tahun 2023



2.3 Capaian Kinerja Sasaran RPJMD, Tujuan dan Sasaran OPD serta Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

a. Keterkaitan Urusan Perangkat Daerah terhadap RPJMD

Urusan Lingkungan Hidup merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 urusan ini mengacu pada Misi 3, yaitu Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan. Adapun keterkaitan DLH Kota Jambi dengan RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2

Keterkaitan Urusan Lingkungan Hidup dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023
Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	40,05	35,19
				Indeks Kualitas Udara	80,78	88,52
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	44,90	49,93

Berdasarkan hal tersebut di atas Dinas Lingkungan Hidup memiliki satu Indikator Tujuan yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Pada tahun 2023 IKLH mengalami penurunan dari kondisi awal tahun 2022 sebesar 59.15 menurun menjadi 57.09, bila dibandingkan dari target sebesar 54,21 dapat direalisasikan sebesar 57,09 persentase capaian kinerjanya mencapai 105,31%. Meningkat atau menurunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dipengaruhi oleh Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), serta Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), dengan perhitungan sebagai berikut :

$$IKLH = ((IKAx30\%) + (IKUx30\%) + (IKTLx40\%))$$

$$IKLH = ((35.19x30\%) + (88.52x30\%) + (49.93x40\%))$$

$$IKLH = 57.09$$

Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Jambi ditargetkan untuk tahun 2023 sebesar 40,05 dapat direalisasikan dengan nilai 35,19 maka terjadi penurunan nilai sebesar 4,86 bila dibandingkan dengan target pada tahun 2023, secara persentase mengalami penurunan dari target sebesar 12,13%. Nilai ini diperoleh dari hasil perhitungan akumulasi Indeks Pencemar Air Sungai dan Air Danau.

Penurunan Indeks Kualitas Air (IKA) anak Sungai dan Danau di Kota Jambi pada Tahun 2023 berdasarkan hasil uji laboratorium parameter yang sangat dominan yang mempengaruhi penurunan kualitas air adalah tingginya Total Coliform dan Fecal Coliform. Hal ini disebabkan karena :

1. Limbah domestik rumah tangga yang langsung dibuang ke anak sungai dan danau.
2. Masih adanya masyarakat yang membuang sampah ke sungai dan danau.
3. Program Padat Karya Kali Bersih (Pakar Kasih) yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Jambi, pada tahun 2023 tidak dilaksanakan, kegiatan tersebut sangat mempengaruhi peningkatan kualitas air sungai.
4. Belum optimalnya pemeliharaan Ipal Sanimas dan Ipal Kotaku.
5. Banyaknya pengunjung datang berwisata air ke Danau Sipin dengan menggunakan perahu yang cukup banyak berpengaruh terhadap penurunan kualitas air.
6. Kurangnya sosialisasi/penyuluhan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan langka-langka antara lain sebagai berikut :

1. Penyebaran informasi, edukasi pengelolaan lingkungan hidup dan penyusunan rencana aksi serta penerapan program kali bersih (Prokasi).
2. Peningkatan kapasitas regulasi serta perlunya komitmen seluruh pemangku kepentingan dan OPD terkait dalam pengelolaan

lingkungan hidup perlu dianggarkan oleh OPD terkait dalam pengendalian sumber pencemaran.

3. Perlu mempercepat memfungsikan jaringan pipa air limbah dan SPALD-T yang ada di Kota Jambi untuk mengurangi air limbah domestik
4. Perlunya penguatan pembinaan dan pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi pada sumber pencemar dari pelaku usaha kegiatan.
5. Perlu adanya keterlibatan dan peran aktif dari berbagai stakeholder baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam upaya penurunan beban pencemaran terhadap badan air penerima.

Sedangkan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Jambi yang ditargetkan untuk tahun 2023 sebesar 80,78 terealisasi dengan nilai 88,52, mengalami kenaikan nilai sebesar 7,74, secara persentase mengalami peningkatan dari target sebesar 9,58%. Perhitungan IKU didapat dengan melakukan pengukuran kualitas udara ambien, parameter NO₂ dan SO₂ dengan metode *passive sampler*.

Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang ditargetkan pada tahun 2023 sebesar 44,90 dapat direalisasikan sebesar 49,93, secara persentase dapat direalisasikan dari target sebesar 111%, nilai IKTL didapat dengan menggunakan rumus :

$$IKTL = 100 - ((84,3 - (\text{Tutupan Hutan} \times 100)) \times (50/54,3))$$

$$\text{Tutupan Hutan} = (\text{Luas Tutupan Lahan} / \text{Luas Wilayah}) \times 100\%$$

$$\text{Luas Tutupan Lahan} = \text{Luas Hutan} + 0,6 \times (\text{Luas Taman Kehati} + \text{RTH} + \text{Luas semak belukar} + \text{Luas Hutan Kota})$$

b. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah

Realisasi sasaran strategis perangkat daerah, tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023
1	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Indeks Kualitas Air	40,05	35,19
		Indeks Kualitas Udara	80,78	88,52
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	44,90	49,93
		Persentase jumlah Pengurangan Sampah ditingkat sumber	14,23%	22,46%
		Persentase jumlah Sampah yang ditangani	76,66%	73,95%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi 2023

Tabel di atas menyajikan capaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi pada Tahun 2023 dengan keterangan sebagai berikut :

1. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Jambi ditargetkan untuk tahun 2023 sebesar 40,05 dapat direalisasikan dengan nilai 35,19 maka terjadi penurunan nilai sebesar 4,86 bila dibandingkan dengan target pada tahun 2023, secara persentase mengalami penurunan dari target sebesar 12,13%.
2. Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Jambi yang ditargetkan untuk tahun 2023 sebesar 80.78 terealisasi dengan nilai 88,52, mengalami kenaikan nilai sebesar 7,74, secara persentase mengalami peningkatan dari target sebesar 9,58%. Perhitungan IKU didapat dengan melakukan pengukuran kualitas udara ambien, parameter NO₂ dan SO₂ dengan metode *passive sampler*.
3. Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang ditargetkan pada tahun 2023 sebesar 44,90 dapat direalisasikan sebesar 49,93, secara persentase dapat direalisasikan dari target sebesar 111,20%,

4. Capaian kinerja indikator "Persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber" tahun 2023 adalah sebesar 157,84% dari target sebesar 14,23%. Secara persentase mengalami peningkatan sebesar 57,83% dari target. Perhitungan persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber dengan menggunakan rumus total volume pengurangan sampah di Kota Jambi terhadap total volume timbulan sampah Kota Jambi sebesar 161.897,58 ton/tahun.
5. Capaian kinerja indikator "Persentase jumlah sampah yang ditangani" tahun ini terealisasi sebesar 73,95% dari target 76,66%, indikator ini dapat dicapai 103,66%. Perhitungan persentase jumlah sampah yang ditangani dengan menggunakan rumus total volume sampah yang dapat ditangani di Kota Jambi terhadap total volume timbulan sampah di Kota Jambi. Hal ini berbanding terbalik dengan persentase pengurangan sampah di tingkat sumber, semakin tinggi persentase pengurangan sampah ditingkat sumber maka persentase jumlah sampah yang ditangani semakin menurun.

c. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilengkapi dengan Indikator, Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Tabel 2,4
Capaian Program Perangkat Daerah Kota Jambi Tahun 2023

No	URUSAN PEMERINTAHAN	Perangkat Daerah	Kebijakan	URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target		Realisasi				Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
						Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Keuangan (%)	Fisik (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi					52.459.112.057		50.995.319.563	97,21			
				Belanja Operasi			52.086.956.311		50.649.054.208	97,23			
				Belanja Modal			372.155.746		346.265.355	93,04			
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota Daerah	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	BB	10.663.810.353	BB	9.996.888.868	93,75			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	83,5	77.024.994	83,7	71.321.960	92,60	100%		
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	4.623.150	2	4.214.600	91,16	100%	Sisa anggaran dikarenakan pencairan sesuai dengan peruntukannya	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	5	54.745.600	5	52.468.400	95,84	100%	Sisa anggaran dikarenakan pencairan sesuai dengan peruntukannya	

				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	5	5.681.994	5	5.505.400	96,89	100%	Sisa anggaran dikarenakan diambil sesuai peruntukan, dan pajak tidak diambil
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	1	3.072.480	1	2.318.400	75,46	100%	Sisa anggaran dikarenakan diambil sesuai peruntukan, dan pajak tidak diambil
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	1	2.185.590	1	1.969.000	90,09	100%	Sisa anggaran dikarenakan diambil sesuai peruntukan, dan pajak tidak diambil
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	3.081.206	1	2.172.760	70,52	100%	Sisa anggaran dikarenakan diambil sesuai peruntukan, dan pajak tidak diambil

				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1	3.634.974	1	2.673.400	73,55	100%	Sisa anggaran dikarenakan diambil sesuai peruntukan, dan pajak tidak diambil	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi keuangan	100 %	8.664.277.712	100%	8.134.788.446	93,89	100 %		
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	81	8.166.322.290	69	7.647.664.306	93,65	100%	Sisa anggaran karena insentif triwulan III, IV tidak tercapai sehingga tidak dicairkan, dan adanya PNS yang sudah pensiun.	Melakukan penagihan retribusi kebersihan kepada pelaku kegiatan usaha
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen panatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	250	483.384.000	1700	473.575.000	97,97	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	10.206.360	12	9.876.000	96,76	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	4.365.062	3	3.673.140	84,15	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	

				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi barang milik daerah	100 %	40.800.000	100%	40.800.000	100%	100 %		
				Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9	40.800.000	12	40.800.000	100	100%		
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Index profesionalitas ASN perangkat daerah	84,5	210.220.000		191.747.445	91,21	100%		
				Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	160	133.200.000	155	122.140.000	91,70	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13	77.020.000	17	69.607.445	90,38	100%	Sisa anggaran dikarenakan biaya kontribusi yang sudah terkunci dan digunakan dibawah anggaran yang tersedia. Biaya perjalanan dinas silpa dikarenakan biaya kontribusinya sudah habis.	Mengajukan Penyesuaian standar harga biaya kontribusi
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum	100 %	465.014.767	100%	446.753.074	96,07	100 %		
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	11.872.144	12	11.345.000	95,56	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	

				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediaka	3	38.027.623	5	28.035.000	73,72	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	
				Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	24.615.000	7	17.225.000	69,98	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	Menyesuaikan anggaran dengan kunjungan tamu
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	390.500.000	52	390.148.074	99,91	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai SPJ.	
				Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum	100 %	74.201.580	100	73.500.000	99,05	100		
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	43.636.368	1	43.200.000	99,00	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	30.565.212	6	30.300.000	99,13	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum	100 %	805.959.319	100%	767.404.553	95,22	100 %		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0	0	-	0%		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	389.560.000	1	381.977.358	98,05	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	

				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	149.741.319	5	123.244.010	82,30	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai SPJ.
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	266.658.000	4	262.183.185	98,32	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum	100 %	326.311.981	100%	270.573.390	82,92	100 %	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20	281.507.300	73	228.727.590	81,25	100%	Sisa anggaran dikarenakan pajak beberapa kendaraan yang tidak bisa dibayarkan karna tidak ada BPKB.
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	43.139.681	23	40.245.800	93,29	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai SPJ.
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1	1.665.000	1	1.600.000	96,10	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai SPJ.
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD	100 %	148.861.216	100%	147.809.000	99,29	100 %	
				Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Tersusunnya RPPLH Kota Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD	0%	0	0	0			

				Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	0%	0	0	0	-	0%		
				Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/Kota (KLHS)	Keselarasn Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Dokumen Perencanaan	100 %	148.861.216	100%	147.809.000	99,29	100 %		
				Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan RPJPD/RPJMD KLHS	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi	1	148.861.216	2	147.809.000	99,29	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai SPJ, serta adanya kegiatan cetak yang tidak diambil.	
				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi	7	1.193.293.102	7	1.138.331.610	95,39	100%		
				Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi	100 %	991.376.268	100%	956.131.124	96,44	100%		
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2	138.892.330	2	128.478.000	92,50	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	87.348.000	1	81.866.395	93,72	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	350	765.135.938	864	745.786.729	97,47	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai SPJ.	

				Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi	100%	178.179.334	100%	171.625.486	96,32	100%		
				Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2	178.179.334	2	171.625.486	96,32	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai SPJ.	
				Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup	22,50%	23.737.500	-4,21	10.575.000	44,55	100%		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	1	23.737.500	1	10.575.000	44,55	100%	Sisa anggaran dikarenakan kegiatan hanya dilaksanakan 1 kali.	Menyesuaikan anggaran dengan kegiatan
				Program Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan	49,93	6.885.341.010	49,93	6.655.883.000	96,67	100%		
				Kegiatan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati RTH Kota Jambi	11,28%	6.885.341.010	0,02%	6.655.883.000	96,67	100%		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	77,7	839.756.900	77,7	812.884.400	96,80	100%	Sisa anggaran dikarenakan gaji PHL dicairkan sesuai kehadiran serta anggaran lainnya yang dicairkan sesuai SPJ.	

				Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	971,18	5.591.990.015	157,56	5.405.714.600	96,67	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan, selisih harga BBM	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	58	453.594.095	112	437.284.000	96,40	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	100%	48.035.300	100%	41.030.000	85,42	100%		
				Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase penyimpanan sementara limbah B3	100%	48.035.300	100%	41.030.000	85,42	100%		
				Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	63	39.035.300	101	36.680.000	93,97	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.	
				Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	20	9.000.000	10	4.350.000	48,33	50%	Sisa anggaran dikarenakan perjalanan dinas digunakan sesuai dengan pengajuan dari perusahaan .	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha

				Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya limbah medis yang bersumber dari fasilitas isolasi diluar fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	0	0	0	-			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	0	0	0	0	-			
				Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	100 %	191.324.000	100%	168.045.522	87,83	100%		
				Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha di bidang lingkungan hidup	100 %	191.324.000	100%	168.045.522	87,83	100%		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	150	85.319.000	108	69.870.000	81,89	100%	Sisa anggaran dikarenakan adanya TTK yang resign dan gajinya tidak dibayarkan.	Koordinasi dengan DPMPSTP terkait izin yang telah dikeluarkan

				Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah pejabat pengawas yang mengikuti bimtek/kursus/pelatihan	1	18.000.000	7	10.483.222	58,24	100%	Sisa anggaran dikarenakan adanya bimtek yang dilaksanakan secara online serta biaya bimtek yang beberapa sudah ditanggung panitia.
				Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	160	88.005.000	161	87.692.300	99,64	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai SPJ.
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	100 %	72.613.895	100%	72.129.100	99,33	100%	
				Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	100 %	72.613.895	100%	72.129.100	99,33	100%	
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	3	26.333.895	3	26.099.100	99,11	100%	Sisa anggaran dikarenakan dicairkan sesuai peruntukan.
				Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan	30	46.280.000	30	46.030.000	99,46	100%	Sisa anggaran dikarenakan

				Hidup yang Dilaksanakan								n dicairkan sesuai peruntukan.
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup	100 %	136.310.500	100%	132.085.560	96,90	100%	
				Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup	100 %	136.310.500	100%	132.085.560	96,90	100%	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	35	14.330.000	25	10.530.000	73,48	100%	Sisa anggaran dikarenakan tidak adanya kasus yang memerlukan uji laboratorium.
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	18	121.980.500	8	121.555.560	99,65	100%	Sisa anggaran dikarenakan n dicairkan sesuai SPJ.
				Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan persampahan	97,42%	33.119.522.681	96,41%	32.643.116.903	98,56	100%	
				Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase berkurangnya sampah yang terangkut ke TPA	22,45%	33.119.522.681	22,46%	32.643.116.903	98,56	100%	
				Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1	864.145.725	1	849.586.935	98,32	100%	Sisa anggaran dikarenakan pembayaran gaji PHL disesuaikan dengan kehadiran, BBM mesin

												genset yang tidak dicairkan karena mesin genset rusak, serta tidak dilaksanakannya perbaikan balon gas WTE karena bahan yang digunakan dari Korea sehingga sulit untuk proses pengiriman.	
				Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	116 484, 79	32.169.115.456	1197 23,96	31.709.957.968	98,57	100%	Sisa anggaran dikarenakan pembayaran gaji PHL disesuaikan dengan kehadiran, serta efisiensi akibat fluktuasi harga bbm.	
				Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	3	80.096.500	3	78.007.000	97,39	100%	Sisa anggaran dikarenakan dibayarkan sesuai SPJ.	

				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1	6.165.000	1	5.565.000	90,27	100%	Sisa anggaran dikarenakan dibayarkan sesuai SPJ.	
--	--	--	--	--	---	---	-----------	---	-----------	-------	------	--	--

Tabel 2.5

Tindak lanjut rekomendasi DPRD atas LKPJ Walikota Jambi Tahun 2022

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Pansus III Agar pemerintah kota Jambi membuat rencana anggaran untuk pembelian lahan pembuatan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST).	DLH akan berkoordinasi dengan Bappeda, PUPR dan Bagian Pemerintahan Setda Kota Jambi untuk pembelian lahan TPST.	Pengurangan sampah ditingkat sumber dapat ditingkatkan.
2	Pansus III Segera mencari solusi tempat pembuangan sampah yang masih ada di bahu jalan karena mengganggu estetika kota,	<ul style="list-style-type: none"> - DLH telah mengganti TPS di Jl. Sumantri dengan Bin sampah beroda. - DLH telah menambah kapasitas depo (depo pasir putihm depo kota baru, depo pasar mama) sebanyak 36 Unit Bin (12 bin/depo) 	Penanganan sampah.
	Pansus III Agar Pemerintah Kota Jambi membuat Anggaran Pembelian Gerobak Motor untuk pengelolaan sampah.	DLH telah membeli 1 (Satu) unit gerobak motor yang dihibahkan untuk KSM di kelurahan Talang Banjar	Pengelolaan sampah dapat ditingkatkan.

2.4 Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019 - 2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2019 - 2023 sebanyak 1 sasaran.

Tahun 2023 adalah tahun ke 5 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, dari satu sasaran strategis dengan sebanyak 5 indikator kinerja yang ditetapkan maka perjanjian kinerja kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
1	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Indeks Kualitas Air	43,00
		Indeks Kualitas Udara	88,10
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	49,93
		Persentase jumlah Pengurangan Sampah ditingkat sumber	22,45%
		Persentase jumlah Sampah yang ditangani	74,97%

b. Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2021-2023

Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi adalah sebagai berikut :

Tabel 2,7
Indikator Kinerja Kunci

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja			Sumber Data
			2021	2022	2023	
1	Urusan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,67	59,15	57,09	DLH
2	Urusan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kota Jambi	97,27%	97,42%	96,41%	DLH
3	Urusan Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh	83%	94%	88%	DLH

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja			Sumber Data
			2021	2022	2023	
		Pemerintah Daerah Kab/Kota				
4	Urusan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	43,99	42.5	35,19	DLH
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	85,02	88.09	88,52	DLH
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	49,91	49.92	49,93	DLH
5	Urusan Lingkungan Hidup	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah Kab/Kota	Persentase penanganan sampah 75,27%, dimana jumlah penanganan sampah 119.002,94 terhadap timbulan sampah 158.106,98	Persentase penanganan sampah 74.97%, dimana jumlah penanganan sampah 119.723,96 terhadap timbulan sampah 159.688,01	Persentase penanganan sampah 73.95%, dimana jumlah penanganan sampah 119.723,96 terhadap timbulan sampah 161.897,58	DLH
6	Urusan Lingkungan Hidup	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	73,70%	90.6%	100%	DLH
7	Urusan Lingkungan Hidup	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah Kab/Kota	7,14%	13.8%	8,50%	DLH
8	Urusan Lingkungan Hidup	Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kab/Kota	0%	0%	0%	DLH
9	Urusan Lingkungan Hidup	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0%	0%	0%	DLH
10	Urusan Lingkungan Hidup	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota, lokasi	100%	100%	100%	DLH

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja			Sumber Data
			2021	2022	2023	
		usaha dan dampaknya di daerah Kab/Kota yang ditangani				
11	Urusan Lingkungan Hidup	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0%	0%	0%	DLH

c. Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021-2023

Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal hanya untuk Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perumahan Rakyat, Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Urusan Sosial, Dinas Lingkungan Hidup tidak termasuk dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal.

d. Capaian SDGs

Pencapaian Program SDGs untuk Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.8
Capaian SDGs

Target dan Indikator		SUMBER DATA	OPD Penanggung Jawab	2020		2021		2022		DOKUMEN PENDUKUNG	
				target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi		
6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK											
6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.											
	Persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman	Jumlah limbah cair industri yang dikelola secara aman dibagi dengan jumlah limbah cair industri keseluruhan yang dilaporkan.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Data Industri yang melakukan swapantau melalui Aplikasi SIMPEL dan melaporkannya secara berkala, Disperindag, DLHK, dan KLHK (Aplikasi SIMPEL)	DLH	8	8	8	8	8	8	Pelaporan Dokumen
7. ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU											
7.2 Jumlah konsumsi energi dari kota yang dicapai, dalam liter atau kWh											
7.2.1	Ada upaya efisiensi energi dari operasional kota	Upaya efisiensi energi dari operasional kota adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi penggunaan energi dari kegiatan harian kota. Kegiatan upaya efisiensi yang dilakukan dapat berupa training penghematan penggunaan energi listrik / bahan bakar dan sosialisasi mengenai penghematan penggunaan energi listrik / bahan bakar.	1. Bagian Keuangan PEMDA 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	DLH							
7.2.2	Ada sistem monitoring dan evaluasi untuk melacak keberhasilan upaya efisiensi energi	Sistem monitoring dan evaluasi menjelaskan kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi dan melakukan penilaian terkait keberhasilan pengurangan penggunaan energi. Informasi terkait pelaporan internal atau notulensi rapat evaluasi efisiensi energi menjadi contoh dari kegiatan efisiensi energi.	Bagian Keuangan PEMDA	DLH							
7.2.3	Capaian keberhasilan efisiensi energi	Persentase dari selisih pemakaian energi tahun 2020 ke 2019 terhadap pemakaian	Bagian Keuangan	DLH							

		tahun 2020 di perkantoran PEMDA.	PEMDA, berupa catatan kWh pembelian listrik untuk operasional kantor dan pembelian bahan bakar untuk kendaraan operasional.									
7.3 Konsumsi energi - terbarukan												
7.3.1	% Bauran energi terbarukan dalam operasional kota	Persentase penggunaan energi terbarukan terhadap total konsumsi energi dalam operasional gedung perkantoran Pemda. Energi terbarukan yang termasuk dalam operasional gedung perkantoran Pemda adalah energi listrik dari sumber terbarukan.	1. Bagian Keuangan PEMDA 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	DLH/ Bag PEREKO NOMIAN								
	1. bauran energi terbarukan <10%											
	2. bauran energi terbarukan 10-50%											
	3. bauran energi terbarukan > 50%											
7.3.2	% Bauran energi bersih-terbarukan dalam operasional transportasi kota	Persentase penggunaan energi bersih-terbarukan terhadap total konsumsi energi dalam operasional transportasi Pemda. Yang dimaksud dengan energi terbarukan dalam operasional transportasi adalah penggunaan mobil listrik tenaga non-fossil (tenaga surya) untuk aktivitas Pemda.	1. Bagian Keuangan PEMDA, bagian umum - pengeluaran rutin per bulan 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	DLH/ Bag PEREKO NOMIAN								

	1. bauran energi terbarukan <10%										
	2. bauran energi terbarukan 10-50%										
	3. bauran energi terbarukan > 50%										
11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN											
11.4. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota											
11.4.1	Indeks Kualitas Udara										
11.4.1.1	Jumlah partikel kualitas udara SO2 (ppm)	Mengikuti metode yang digunakan KLHK yang sudah berjalan sampai saat ini.	1. KLHK (Dit Pengendalian Pencemaran Udara, Dirjen PPKL) 2. Aplikasi dan Website Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) pada https://ispu.menlhk.go.id/map.html	DLH	14.47	14.67	27.79	27.79	79.68	79.68	Laporan Indeks Kualitas Udara Di Kota Jambi
	> 0,14 ppm										
	< 0,14 ppm										
11.4.1.2.	Jumlah partikel kualitas udara NO2 (ppm)	Mengikuti metode yang digunakan KLHK yang sudah berjalan sampai saat ini.	1. KLHK (Dit Pengendalian Pencemaran Udara, Dirjen PPKL) 2. Aplikasi dan Website Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) pada https://ispu.menlhk.go.id/map.html	DLH	30.74	30.74	21.24	21.24	80.76	80.76	Laporan Indeks Kualitas Udara Di Kota Jambi
	> 0,08 ppm										
	< 0,08 ppm										
11.4.1.3	Jumlah partikel kualitas udara O3 (µg/m3)	Mengikuti metode yang digunakan KLHK yang sudah berjalan sampai saat ini.	1. KLHK (Dit Pengendalian Pencemaran Udara, Dirjen PPKL) 2. Aplikasi dan Website Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) pada https://ispu.menlhk.go.id	DLH							

			/map.html								
	> 50 µg/m3										
	< 50 µg/m3										
11.4.2.	Persentase sampah kota yang terkelola										
11.4.2.1	Jumlah sampah kota yang terkelola	Persentase jumlah timbulan sampah kota yang terkelola terhadap jumlah timbulan sampah kota yang diproduksi secara keseluruhan pada tahun pelaporan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	DLH	90.89	91.56	90.89	97.28	90.89	97,42	
11.4.2.2	Jumlah inisiatif bank sampah per kelurahan	Jumlah bank sampah yang dikelola baik oleh pemerintah, swasta, maupun perorangan di suatu kota pada tahun pelaporan.	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	DLH	5	4	5	3	5	1	
11.4.3	Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10	Rerata tahunan PM 10 di perkotaan per jumlah penduduk	Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) - KLHK	DLH							
11.5 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.											
11.5.1	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	Total luasan RTH, RTNH, serta jalan dibandingkan luas lahan terbangun di kawasan perkotaan dinyatakan dalam bentuk persentase.	LAPAN (citra satelit), Kementerian PUPR	DLH				8108.58 (Ha)		8098.48 (Ha)	
12. KOSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB											
12.2. Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.											
	Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya.	Jumlah timbulan limbah B3 yang dikelola dari sektor industri manufaktur, agroindustri, pertambangan, energi dan migas, prasarana jasa dibagi dengan total timbulan limbah B3 yang dihasilkan dalam kota pada tahun pelaporan.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan, DISPERINDAG, DLHK, Kota Dalam Angka.	DLH							
13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM											
3.2. Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan,											

strategi dan perencanaan nasional												
13.2.1	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) dalam satu tahun per jumlah penduduk.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIGSMART Online).	DLH	-	-						
13.2.2	Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)											
13.2.2.1	Energi	Terdapat kebijakan dan pelaksanaan potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di bidang energi. *Atau penilaian berdasarkan ada/tidak dokumen Rencana Aksi Iklim	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2. UPT Terkait 3. KLHK	DLH	4	1	6	2	10	4	Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim Pemerintah Kota Jambi. Program Kampung Iklim	
	1. tidak terdapat kebijakan											
	2. terdapat kebijakan namun belum dilaksanakan											
	3. terdapat kebijakan < 50% kebijakan telah terlaksana											
	4. terdapat kebijakan dan < 50% kebijakan telah terlaksana											
13.2.2.2	Limbah	Terdapat kebijakan dan pelaksanaan potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di bidang pengelolaan limbah. *Atau penilaian berdasarkan ada/tidak dokumen Rencana Aksi Iklim	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2. UPT Terkait 3. KLHK	DLH	40	40					Pelaporan dokumen RKL-RPL per triwulan dan per Semester	
	1. tidak terdapat kebijakan											
	2. terdapat kebijakan namun belum dilaksanakan											
	3. terdapat kebijakan < 50% kebijakan telah terlaksana											
	4. terdapat kebijakan											

	2. terdapat kebijakan namun belum dilaksanakan										
	3. terdapat kebijakan < 50% kebijakan telah terlaksana										
	4. terdapat kebijakan dan < 50% kebijakan telah terlaksana										
17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN											
17.2.1.5	Energi bersih terbarukan (misal: solar panel di kantor pemerintah; ganti mobil/motor listrik/bis BBG; untuk PJU (penerangan jalanan umum), untuk WTE (waste to energi))	Anggaran daerah yang dialokasikan untuk pembangunan / renovasi infrastruktur energi bersih terbarukan yang mendukung layanan SDGs di tahun pelaporan.	Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD)	BPKAD dan DLH	-	-	-	30698500	-	53644370	
17.2.1.6	Sarana Pengolahan Limbah	Anggaran daerah yang dialokasikan untuk pembangunan / renovasi infrastruktur limbah yang mendukung layanan SDGs di tahun pelaporan.	Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD)	BPKAD dan DLH	-	-	-	-	-	-	
17.2.1.8	Hutan Kota	Anggaran daerah yang dialokasikan untuk pembangunan / renovasi infrastruktur hutan kota yang mendukung layanan SDGs di tahun pelaporan.	Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD)	BPKAD dan DLH	1229480000	1205159950	990080962	977779569	1219187527	1197892260	

BAB III

CAPAIAN KIMERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan ini diterima dari Pemerintah Pusat maupun yang diterima dari Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi tidak mendapatkan tugas pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

BAB IV

INOVASI, PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Inovasi Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Daftar Inovasi Organisasi Perangkat Daerah Kota Jambi Tahun 2023

No	Inovasi	Tahun	Nama OPD	Kategori Inovasi	Ringkasan Inovasi
1	SIIPAL	2023	DLH	Pelayanan Publik	Untuk meningkatkan efisiensi waktu dalam mengelola data dan pelayanan kepada pelanggan lebih efektif dan terdata dengan baik maka dibutuhkan sebuah sistem informasi laboratorium yang mampu mengatur segala proses manajemen dan penyajian informasi yang diperlukan oleh pelanggan UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, seperti proses pendaftaran sampel uji, pembayaran, penerbitan hasil uji dan informasi lainnya. Oleh karena itu perlu merancang inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi dalam melakukan pengujian air limbah pada UPTD Laboratorium melalui Aplikasi yang dinamai Aplikasi SIIPAL (Sistem Informasi Pelayanan Admisitrasi Laboratorium) yang bertujuan untuk agar lebih optimal dan efektifnya waktu dalam melakukan pelayanan dan tercapainya kepuasan pelanggan.

Adapun prestasi dan penghargaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi selama tahun 2023, sebagai berikut :

1. Penghargaan Nirwasita Tantra sebagai Entitas Pemerintahan kategori Kota Sedang Terbaik dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Tahun 2022 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
2. Penghargaan Program Kampung Iklim (Proklam) Kategori Madya diberikan kepada Kelurahan Eka Jaya, Kelurahan Legok dan Kelurahan Tanjung Sari dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

3. Penghargaan Program Kampung Iklim (Proklam) Kategori Utama diberikan kepada Kampung Bersatu dan Kampung Bestari Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
4. Penghargaan terhadap Taman Kongkow Kota Jambi sebagai taman yang Memenuhi Standardisasi Ruang Bermain Ramah Anak dengan Peringkat RBRA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
5. OPD Terbaik dalam Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Jambi Tahun 2023.
6. Juara Harapan I Lomba Inovasi antar OPD Kota Jambi Tahun 2023.

BAB V

PENUTUP

Laporan Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 terdiri dari indikator :

1. Indeks Kualitas Air dengan nilai 87,87%
2. Indeks Kualitas Udara dengan nilai 109,58%
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan dengan nilai 111,2%
4. Persentase Jumlah Pengurangan Sampah ditingkat Sumber dengan nilai 157.84%
5. Persentase Jumlah Sampah yang Ditangani dengan nilai 103,66%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 indikator tersebut, secara umum rata-rata persentase capaian dalam kategori sangat baik.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.52.459.112.057,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.50.995.319.563,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 Dinas

Lingkungan Hidup Kota Jambi kondisi anggaran adalah Silpa sebesar Rp. 1.463.792.494,-.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 50.995.319.563,- (lima puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Walikota Jambi. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi adalah 97.20% atau dalam skala ordinal **Baik** dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Jambi.

Dengan tersusunnya Laporan Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Jambi.